

AMANAT - GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH, SEBAGAI TRUP APEL PAGI, DALAM RANGKA MEMPERINGATI 11 TAHUN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH, TANGGAL 26 MEI 1970 DIDEPAN PEGAWAI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH PROP. DAERAH ISTIMEWA ATJEH DAN DIBATJAKAN DJUGA DALAM UPATJARA APEL PAGI TANGGAL TERSEBUT PADA KANTOR2 DINAS DILINGKUNGAN PROPINSI/KANTOR BUPATI/WALIKOTA KEPALA DAERAH/KEPALA PERWAKILAN DALAM PROP. DAERAH ISTIMEWA ATJEH. =

=====

ASSALAMU'ALAIKUM W.W.-

Saudara2 hadirin jang terhormat,

Marilah kita bersama-sama mengutjapkan sjukur Alhamdu lillah kehadiran Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan kurnia Nja hari ini tanggal 26 Mei 1970, kita telah dapat berkumpul ditempat ini untuk memperingati genap 11 tahun Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Sedjak tahun 1945, Rakjat Atjeh sebagai bahagian dari Bangsa Indonesia jang besar, telah turut dalam perdjjuangan mempertahankan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Proklamasi 1945.

Peranan Daerah dan Rakjat Atjeh merupakan unsur jang sangat menentukan dan sedjarah pasti telah mentjatat, betapa besarnya sumbangan dan pengorbanan jang telah diberikan untuk mengudjudkan tekad "sekali merdeka tetap merdeka". Pada saat itu, achir bulan Agustus 1945 hingga achir bulan Desember 1949, peristiwa besar jang didorong oleh tjinta Agama, Bangsa dan Nusa, setia kepada Pantjasila dan Undang2 Dasar 1945, sehingga sedjengkal tanah-pun bumi Iskandarmuda tidak dapat diduduki Oleh Belanda, djustru karena itulah Daerah Atjeh benar2 merupakan Daerah modal Kemerdekaan Republik Indonesia.

Rakjat Atjeh jang telah tampil dengan keberanian jang telah dimilikinja turun-temurun, ditengah-tengah perdjjuangan bersendjata didalam negeri dan dalam kantjah perdjjuangan diplomatik diluar negeri jang dilakukan melalui Wakil2 R.I.

Saudara2 hadirin jang berbahagia.

Setelah melalui berbagai arus dan gelombang perang kemerdekaan R.I. dengan sukses, maka dalam tahun 1950 Atjeh mendjadi Propinsi tersendiri, jang usianja tidak lama disebabkan peleburan kembali Propinsi Atjeh kedalam Propinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 1956 Atjeh mendapat kembali kedudukannja berdasarkan Undang2 No.24 tahun 1956, Daerah Atjeh ditetapkan mendjadi Daerah Otonom terpisah dari Propinsi Sumatera Utara di Medan.

Berdasarkan

Berdasarkan fakta sedjarah masa jang lampau, bahwa Daerah Atjeh memiliki tatakehidupan dan sifat2 khusus, dan atas-pertimbangan bahwa didalam gelora perdjjuangan Kemerdekaan R.I. Daerah dan Rakjat Atjeh telah memberikan amal djasanya jang tak ternilai, maka pada tanggal 26 Mei 1959 dengan Keputusan Perdana Menteri R.I. No.1/Missi/1959 Daerah Atj Atjeh mendjadi Daerah Swatantra Tk.I jang disebut Propinsi Daerah Istimewa Atjeh jang kemudian dikuatkan dengan Undang2 No.18 tahun 1965. Hak keistimewaannya terutama mengenai otonomi jang seluas-luasnja didalam bidang Keagamaan, Peradatan dan Pendidikan.

Dalam bidang keagamaan ^{telah} djajatakan bahwa di Propinsi Daerah Istimewa Atjeh berlaku Unsur-Unsur Sjari'at Islam dengan tertib dan seksama dengan mengindahkan peraturan perundangan Negara. Pelaksanaan Unsur2 Sjari'at Islam di Daerah ini, memerlukan peningkatan terutama mengusahakan menenangkan adanya kesadaran beragama kepada Ummat Islam.

Dalam bidang peradatan, memerlukan perhatian jang serius dari masjarakat, sesuai dengan kata pepatah didaerah ini "Adat ngon hukom lagee zat ngon sipheue" artinja Adat dengan hukum seperti zat dengan sifat. Adat dengan hukum tidak bisa dipisahkan tetapi mendjadi satu, oleh karena itu perkembangan dan pertumbuhan peradatan di Daerah Istimewa Atjeh ini, harus sedjalan pula dengan perkembangan dibidang Keagamaan dan Pendidikan.

Dalam bidang Pendidikan, jang masa jang lalu sedemikian tertinggalnja sebagai akibat keras hatinja Rakjat Atjeh menentang pendjadjahan dan kedjamnja politik kolonial di daerah ini. Maka sekarang ini telah mendapat kemadjuan jg-pesat sekali. Mulai dari pendidikan rendah, menengah dan tinggi jang meliputi pendidikan umum, agama dan kedjuruan-telah terdapat di Banda Atjeh, Darussalam dan dibeberapa ibu kota di Daerah Istimewa Atjeh ini.

Saudara2 hadirin jang terhormat,

Pantja krida Kabinet Pembangunan pada umumnya dan Pelita serta Pemilu pada khususnya hendaklah kita sukseskan dalam rangka mengisi "keistimewaan" Daerah ini. Sebagaimana Saudara2 ketahui bahwa Tudjuan Pelita ialah untuk mengisi Kemerdekaan, menaikan taraf hidup Rakjat, memanfaatkan kemampuan setjara maksimal dan meletakkan landasan-kuat bagi tahap2 berikutnya. Sedangkan Pemilu jang Insja Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 5 Djuli 1971 jang akan datang adalah bertudjuan untuk melaksanakan ke-
daulatan

kedaulatan rakyat atas dasar Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan dan mengwudjudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indone - sia, memilih wakil-wakil rakyat dalam Lembaga Permusjawa - ratan dan Perwakilan (MPR, DPR dan DPRD Tk.I, dan Tk.II) - jang benar2 membawa amanah isi hati nurani rakyat, dan untuk mentjapai kemenangan Orde Baru dalam merealisir penjusunan kembali seluruh tata kehidupan rakyat, bangsa dan negara - jang diletakkan kepada kemurnian Pantjasila dan Undang2 - Dasar 1945. Orde Baru menghendaki perubahan struktur poli - tik tumbuh dari bawah sesuai dengan azas demokrasi jang - ditempuh dengan djalan Pemilu.

Saudara2 hadirin jang berbahagia.

Berhubung dengan itu sebagai Aparatur Negara, abdi - Rakyat di Daerah ini kami tandaskan sekali lagi :

1. ^{/Amankan dan}Amalkanlah Pantjasila serta Undang-Undang Dasar 1945 - jang senantiasa mendjiwai dan mendjadi pedoman bagi se - tiap apparatur Negara dalam menghadapi setiap situasi - dan kondisi Negara dan Bangsa.
2. Tanamkanlah kejakinan dan kesadaran beragama, serta ber - taqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa setjara mendarah dan - mendaging sebagai kekuatan bathin didalam menghadapi - setiap tantangan dan udjian.
3. Tingkatkanlah daja mampu dan daja guna, sebagai apara - tur Negara jang djudjur, ahli, tjakap dan trampil dalam menunaikan tugas2 jang dipertjajakan.
4. Sukseskanlah Pelita Nasional/Daerah dan Pemilu dalam - mengisi keistimewaan Daerah ini.
5. Peliharalah terus keamanan dan ketertiban daerah sambil merantapkan kerukunan hidup di-tengah2 masjarakat kita.


Moga-moga Tuhan Jang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada kita semua.

Wabillahittaufiq Walhidajah.

Wassalamu'alaikum W.w.-

BANDA ATJEH, 26 MEI 1970.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

 *A. Muzakkir Walad*
= A. MUZAKKIR WALAD =



Memperingati
Dua Belas Tahun Daerah
Istimewa Atjeh

26 MAI 1959 - 26 MAI 1971

Diselenggarakan oleh :
Secretariat D.P.R.D. - G.R.
Prop. Daerah Istimewa Atjeh.

M E M P E R I N G A T I

DUA BELAS TAHUN DAERAH ISTIMEWA ATJEH

26 M A I 1959 - 26 M A I 1971

-----Diselenggarakan oleh :
Secretariat DPRD-GR
-----Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

SIDANG ISTIMEWA KE-I/71

- Tanggal : 26 Mei 1971.
D j a m : 9.00 Wib, s/d 10.30 Wib.
Pimpinan : Sofjan Hamzah (Wkl.Ketua).
Sekretaris : M.Noerdin (Kepala Sekretariat).
- Hadir para Anggota : Gazali Hasan, Abdullah Husin, A.Wahab Ibrahim, Ramli Saady, M.Thahir Husin B.A, Sa'adiah Sabi, M.Saleh Daud, Tgk.A.Hamid Aly, Drs.M.Kaoy Sjah, H.Djaafar Hanafiah, T.Hitam Muly, Murdin A.R, Sjarifah Chatidjah, Said Hasan Baahud, Ibrahim Kaoy, Sofjan Hamzah, Tgk.Musa Mansur, Asnawy Hasjmy SH, Zulkifli Ismail S.H, AKP.Drs.Idris Aly, Drs.Said Zainal Abidin, Achmed Daudy M.A, Tgk.Hamzah Junus, Achmad Marzuki, T.Radja Hitam, Muhammad S.H, A.Masry, M.Jusuf Ubit, Sjamsuddin Jacob B.A, Tgk.H.M.ALY BALWY.-
- Tidak hadir : Tgk.Djamaluddin Waly, Razali Sabil, K.Ishek Sulaiman, Shahrin Musa, Sa'uddin H.I, Tgk.Muhammad, T.Hasan Sjah, Ismail Ben, M.Da'ed Hasan, Mudji Budiman, Moeckmanan, B.Sornin Seregar, Drs.M.Diah I, M.Nur Madjid S.H, Letkol.Muhammadiyah Hadji S.H, Kapt.S.Deni Banta Tjut B.A, Dsh. Abdullah Aly, Drs.Ali Basjah Amin,-
- Turut hadir : 1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Ist.Atjeh.
2. Kastaf Kodam-I/Iskandarmuda, mewakili Pangdam-I/Iskandarmuda.
3. Djaksa Tinggi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
4. Kadapol-I/Atjeh.
5. Ketua Pengadilan Tinggi.
6. Ketua Madjlis Ulama Propinsi Daerah Ist. Atjeh.
7. Muspida Kotamadya Banda Atjeh.
8. Muspida Kabupaten Atjeh Besar.
9. Pimpinan Pertiwi Propinsi Daerah Ist.Atjeh.
10. P a r a R e k t o r.
11. Pimpinan Persit Kartika Chandra Kirana.
12. Kepala2 Biro Kantor Gubernur/Kdh.Propinsi Daerah Ist.Atjeh.
13. Kepala2 Dinas/Djawatan Neveu Propinsi Daerah Ist.Atjeh.
14. Pembesar2 Sipil/Militer.
15. Pimpinan Parpol/Ormas.
16. Para undangan.

A T J A R A :

Sidang Istimewa ke-I/1971 dalam rangka memperingati 12 Tahun Daerah Istimewa Atjeh (atjara selengkapnja terlampir)

DJALANNJA RAPAT :

- Sekretaris : Melaporkan djumlah anggota jang hadir.
Kemudian ber-turut2 mempersilakan saudara Wazir Aly dan Mursalam Addy, masing2 untuk membatjakan Ajat2 Sutji Al-Qur'an dan memimpin lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- Pimpinan : Setelah menjampaikan pidato pembukaan sidang, ber-turut2 mempersilakan Gubernur/Kepala Daerah dan Ketua Muspida jang diwakili oleh Kepala Staf Kodam-I/Iskandarmuda, masing2 untuk menjampaikan kata sambutan.

- untuk

- Untuk menandakan sidang Istimewa tersebut mendjelang penutupan oleh Saudara Wazir Aly telah pula membatjakan Ajaran Sutji Al-Qur'an.

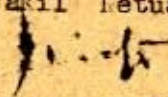
-(dalam sidang selanjutnya lihat halaman2 berikutnya).-

Banda Atjeh, 26 Mei 1971.-

PERHIMPUNAN PERMUDAAN ANJAT BANGSA
GOPONG BEJONG

PERHIMPUNAN BANGSA ISLAM ATJEH

Wakil Ketua,

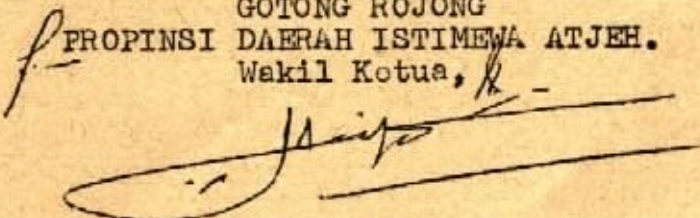

* SOTAP HANTAH *

TERTIB ATJARA SIDANG ISTIMEWA KE-I/1971 DALAM RANGKA
MEMPERINGATI HARI LAHIR DAERAH ISTIMEWA ATJEH
JANG KE- XII DAN PEMBUKAAN MASA SIDANG KE-I
TAHUN 1971-1972 DPRD-GR PROPINSI DAERAH ISTI-
MEWA ATJEH.-

1. Lapuran quorum Dewan oleh : Secretaris Daerah.
2. Pambatjaan ajat2 sutji Al-Qur'an:
oleh : Wazir Aly.
3. Lagu Kebengsaan Indonesia Raja : Direktorat Djenderal Kebudayaan
dipimpin oleh Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
4. Mengheningken tjipta dipimpin .: Secretaris Daerah.
oleh
5. Pembukaan dan kata-kata sambutan : Wakil Ketua (Sofjan Hamzah).
an oleh
6. Pidato memperingati ulang tahun: Gubernur Kepala Daerah Propinsi
jang ke-XII Daerah Istimewa Daerah Istimewa Atjeh.
Atjeh oleh
7. Kata-kata sambutan dari : Ketua Muspida Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh.
8. Pambatjaan ajat2 sutji al-Qur'an:
oleh : Wazir Aly.
9. P e n u t u p o l e h : Wakil Ketua (Sofjan Hamzah).

Banda Atjeh, 26 Mai 1971.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH.
Wakil Ketua, *h*


= SOFJAN HAMZAH =

Pidato - Pembukaan Wakil Ketua DPRD-GR Propinsi Daerah Istimewa Atjeh pada sidang Istimewa untuk memperingati genap 12 tahun lahirnja Daerah Istimewa dan pembukaan Masa Sidang ke-I tahun 1971/1972 tanggal 26 M a i 1971.-

ASSALAMU'ALAIKUM. W. W.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

Dengan Rahmat Allah Tuhan Jang Maha Esa, Sidang Istimewa memperingati genap dua belas tahun lahirnja Daerah Istimewa Atjeh dan pembukaan Masa Sidang ke-I tahun 1971/1972 dengan ini kami buka.....

1. Jth.Sdr.Pimpinan dan para Anggota Dewan,
2. Jth.Sdr.Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah,
3. Jth.Sdr.Ketua dan para Anggota Muspida.
4. Jth.Sdr.Ketua Pengadilan Tinggi.
5. Jth.Sdr.Pimpinan Madjlis Ulama.
6. Para Rektor.
7. Para Undangan, hadirin dan hadirat jang kami muliakan.

Pudji dan sjukur kita persembahkan kehadiran Allah S.-W.T. selawat dan salam atas djundjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W. jang dengan berkat kerunia-^Wja pada hari jang berbahagia ini Dewan Perwakilan Rakjat - Daerah Gotong Rojong Propinsi Daerah Istimewa Atjeh se bagai mana djuga di tahun-tahun jang lalu dapat mengadakan sidang Istimewa untuk memperingati hari lahirnja Daerah Istimewa Atjeh dan pada tahun ini bersamaan wak tunja dengan pembukaan Masa Sidang Pleno ke-I tahun 1971/1972.

Dengan memperingati lahirnja Daerah Istimewa Atjeh jang ke dua belas ini berarti kita mengingat kembali sedjarah daerah kita dua belas tahun jang lampau. Jaitu detik-detik jang tidak boleh kita lupakan dan tak mungkin terlupa di-setiap dada putra putri didaerah kita ini.

Daerah kita sedjak tahun 1957 oleh Pemerintah Pusat telah didjadikan kembali mondjadi Propinsi dengan otonomi se-luas-luasnja berdasarkan undang-undang No.24 tahun 1956.

Kemudian pada tahun 1959 kepada daerah Atjeh diberi sebutan " DAERAH ISTIMEWA " jaitu dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.I/MISSI/1959 jg-pada pokoknja memberikan keistimewaan kepada daerah - Swatantra Tingkat I Atjeh dalam tiga bidang; jaitu ke-agamaan, peradatan dan pendidikan. Keputusan mana mempunyai nilai jang sangat penting bagi kita, karena telah dapat mentjiptakan suasana rukun dan damai di daerah ini kembali sebagaimana jang diharapkan dan dikehendaki oleh rakjat kita.

Kalau kita mengkadi kembali sedjarah perdjjuangan rakjat Atjeh, baik di-saat2 pertama kali pendjadjah Belanda mengindjak kakinja di bumi Indonesia maupun dikalamendjelang kemerdekaan, dikala itu rakjat Atjeh jang dididjwai semangat kepahlawanannja telah memberikan handel jang sungguh2 besar bagi perdjjuangan Bangsa Indonesia. Rakjat Atjeh.....

Rakjat Atjeh bersama pahlawan Nasionalnja Tgk. Thjik di-Tiro, T. Umar, Tjut Njak Dhien, Tjut Meutia dan lain-lain maju ke gelanggang medan pertempuran mengusir pendjadjah Belanda jg bertjokol di tanah air tertjinta ini.

Rakjat Atjeh telah menundjukkan kesetiaannja demi perjuang an kemerdekaan Bangsa Indonesia, jaitu perjuangan untuk membebaskan Rakjat Indonesia dari tjengkraman tangan-tangan Imperialisme Belanda.

Di waktu Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Atjeh telah didjadikan daerah basis dalam mengatur gerak dan strategi perjuangan merebut kemerdekaan. Sehingga kepada Atjeh diberi djuluan " DAERAH MODAL REPUBLIK INDONESIA ". Gelar Daerah Modal sungguh sangat tepat djika ditindjau dari segi kesatriaannja rakjat Atjeh dalam memperdjungkan Negara Indonesia merdeka.

Sidang jang mulia,

Seperti telah kami kemukakan tadi daerah Atjeh punja tiga ke-Istimawaan, keagamaan, peradatan dan pendidikan. Dengan adanja anugerah keistimawaan, maka oleh Pemerintah dan rakjat telah memamfaatkannja dengan baik dan tertib.

Dalam rangka pengisian otonomi se-luas2nja oleh Pemerintah-daerah dalam bidang keagamaan telah diambil langkah2 jang antara lain :

1. Perda No.1/1965 tentang Sjiar Islam.
2. Peraturan Daerah No.1 tahun 1966 tentang pembentukan Madjlis Ulama, sebagai suatu lembaga Pemerintah Daerah.
3. Keputusan DPRD-GR Propinsi Daerah Istimewa-Atjeh No.29/DPRDGR/1969, jaitu pengesahan keputusan Musjawarah Alim Ulama se-Propinsi Daerah Istimewa Atjeh jang berlangsung pada tanggal 21 s/d 26 Nopember 1967 di Banda Atjeh.
4. Perda No.6/1966, tentang larangan memasukan, menjimpan dan mendjual minuman keras.
5. Keputusan Dewan No.B-7/II/DPRDGR/1968 jangmenjetakan masalah keagamaan Islam jang telah difatwakan oleh Madjlis Ulama didjadikan pedoman pelaksanaan didalam Ormas/Orpol Islam masing2.
6. Keputusan bersama Gubernur/Kepala Daerah, Perwakilan Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Madjlis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tentang pelaksanaan Zakat Fitrah dalam Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
7. Memorandum DPRD-GR Propinsi Daerah Istimewa Atjeh No.B-7/2/DPRDGR/1971 tentang pembinaan achlaq.

Dan lain2 lagi jang menurut hemat kami tidak perlu kami sebutkan satu persatu.

Di bidang pendidikan dengan kota peladjar Mahasiswa Darussalam merupakan tempat penempatan tunas-tunas muda jang nantinja akan memikul tanggung djawab Negara, Bangsa dan Agama. Darussalam hingga saat ini telah mentjetak puluhan sardjana dari berbagai djurusan dan telah menundjukkan kemampuannja bagi pembangunan daerah chusussnja dan nasional umumnja. Kesemuannja itu berkat adanja kesadaran Pemerintah dan Rakjat daerah ini dalam menggunakan keistimawaannja bagi pembangunan disegala bidang. Sidang jang.....

Sidang jang berbahagia,
Di-saat2 kita memperingati dua belas tahun lahirnja Daerah-
Istimewa Atjeh, kita semua sedang dihadapkan kepada tugas -
Nasional jang maha berat jaitu tugas mensukseskan Pantja -
Krida Kabinet Pembangunan jang antara lain :

Pertama : Memelihara adanja kestabilan dalam bidang ekono-
mi/politik.

Kedua : Menjelaskan Pembangunan Lima Tahun (Pelita).

Ketiga : Melaksanakan Pemilihan Umum.

Ke-tiga tugas Nasional ini sangat erat hubungannya satu de-
ngan jang lain. Tanpa adanja kestabilan Politik, dapat me-
ngganggu kestabilan Ekonomi dan otomatis mengakibatkan ter-
hambatnja Pelita, begitu pula Pemilu tak mungkin dapat di-
laksanakan dengan tertib dan sempurna djika ada ketegangan-
Politik dalam masyarakat. Djadi dalam menghadapi tugas be-
rat ini jang sudah berada dipundak kita semua, memerlukan -
adanja kesatuan pandangan, kesatuan program kerdja, kesatu-
an penilaian terhadap program jang telah digariskan Pemerin-
tah.

Pembangunan memang dititik beratkan kepada pembangunan ekono-
mi, disamping itu, djuga harus dibina kehidupan Politik -
jang sehat, dalam arti kata menumbuhkan kesadaran kehidupan
bernegara.

Stabilitas Politik jang telah berhasil kita tjiptakan se -
djak permulaan tahun 1969 hingga saat sekarang ini perlu ki-
ta tingkatkan terus, karena ini merupakan tempat berpidjak-
demi tertjapainja tudjuah perdjuaan Orde Baru.

Sidang jang mulia,

Negara dan Bangsa kita dewasa ini sedang sibuk2nja kampanye
Pemilihan Umum, dimana masing2 golongan ingin mempengaruhi-
massa rakjatnja dalam pemungutan suara jang Insja Allah pa-
da tanggal 3 Djuli 1971 akan kita laksanakan bersama.

Kami mengharapkan agar dalam masa kampanye ini hendaknya -
Partai2 Politik/Golongan Karya dapat memberi pengarahannya ke-
pada rakjat jaitu pengarahannya kepada kesadaran bernegara.

Djanganlah kampanye ini nantinja mentjiptakan suasana iklim
jang merugikan bagi ketentraman masyarakat dan rakjat kita,
djika hal ini terdjadi akan membawa kematjetan bagi pemba-
ngunan Bangsa dan Negara.

Dan hal ini pula akan memberi peluang jang sangat baik un-
tuk came backnja rezim orde lama G 30 S/P.K.I.

Disamping itu sama2 kita mengharapkan agar hasil Pemilu nan-
tinja tidak bisa lain, harus tetap terdjamin tegak-teguhnya
Pantjasila dan undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu ki-
ta sama2 tidak mengharapkan hasil Pemilihan Umum nantinja -
jang bertudjuan mengindjak-indjak falsafah Negara Pantjasila
dan undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar Konstitusional
Negara kita. Ini sekali gus berarti mempertahankan kelang-
sungan perdjuaan Orde Baru, monudju masyarakat adil mak-
mur berdasarkan Pantjasila.

Sidang jang mulia,

Jang penting bagi kita dalam memperingati lahirnja Daerah -
Istimewa Atjeh ialah saling mengadakan introspeksi kepada -
diri masing2 terhadap hasil2 usaha apa jang telah dan belum
ditjapai di tahun jang lalu dan memikirkan tugas2 selanjut-
nja. Agar pengalaman2 dimasa lampau mendjadi aktibar bagi -
kita demi kelitjinan djalan dalam usaha pembangunan daerah-
Atjeh chususnja dan Negara Indonesia umumnya.

Berbahagialah manusia itu, djika ia mengetahui kelemahan2 -
diri sendiri dan amat berbahajalah manusia itu apabila dia
tidak mengetahui kelemahan jang ada pada dirinja.

Sidang jang mulia,.....

Sidang jang mulia,
Pada saat sidang Istimewa ini kita djuga melangsungkan pembuka-an Masa Sidang Pleno ke-I tahun 1971/1972 DPRD-GR Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
Dalam kesempatan ini kami merasa perlu melapurkan kegiatan Dewan antara masa penutupan Sidang Pleno ke-IV tahun 1970/1971 dan masa pembukaan Sidang Pleno ke-I tahun 1971/1972 ini, jang antara lain :

1. Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah - Gotong Rojong Propinsi Daerah Istimewa Atjeh telah mengadakan kegiatannya sedjak tanggal 14 April s/d 15 Mei 1971 guna membahas Rentjana Anggaran - Pendapatan dan Belandja Daerah untuk tahun 1971/1972 sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib Dewan.
2. Pada tanggal 8 Mei 1971 jang baru lalu Pemerintah Daerah telah menerima kundjungan Komisi E (Keuangan) DPRD-GR Propinsi Djawa Timur dan pada tanggal 10 Mei 1971 Panitia Anggaran Dewan telah mengadakan pertemuan dan dialog langsung dengan sahabat2 kita dari Djawa Timur, dialog mana telah memberikan jang sangat berguna bagi kedua pihak dalam menjusun R.A.P.B.D. untuk tahun 1971/1972 dan untuk masa2 jang akan datang.

Sidang jang terhormat,
Sesuai dengan Pengumuman Pimpinan Dewan tanggal 12 Mei 1971, masa sidang Pleno ke-I tahun 1971/1972 ini berlangsung ± 5-hari yakni dari tanggal 26 Mei s/d 1 Djuni 1971 dan sebagai atjaranja adalah khusus mengenai pembahasan R.A.P.B.D. untuk tahun 1971/1972.
Hendaknya dengan waktu jang amat singkat ini dapatlah Dewan jang terhormat ini memamfaatkannya agar pengesahan R.A.P.B.D. ini tepat pada waktunja.

Madjlis jang terhormat,
Kurangleh sempurna kiranja, andaikata pada achir pidato kami ini tidak kami singgung sekedarnja suatu peristiwa penting - jaitu peristiwa Maulidnja Nabi Besar Muhammad S.A.W. jang saatnja bersamaan dengan berlangsungnja Masa Sidang kita ini. Peristiwa Maulid ini lebih2 mengandung maksud jang mendalam, djustru saatnja bertepatan dengan masa kampanye Parpol/Golkar dalam rangka Pemilu.

Inti adjaran Muhammad S.A.W. *انما جئت لانيتم وكمكارم الاخلاق*

bahwa dengan achlak dan sopansantun jang tinggi, terutama - dalam usaha kampanye masing2 Parpol/Golkar, insja Allah suasana tertib aman dan tentoram akan terdjamin dalam masyarakat kita, sehingga Pemilu jang sedang kita laksanakan sekarang benar2 membawa rahmat dan sedjahtera, mengantarkan kita semua kepada suatu masyarakat jang adil makmur serta mendapat ridhanja Allah S.W.T.

بإذن الله تعالى ورحمة غفور

Sidang hadirin dan hadirat sekalian,
atas nama Dewan, kami menjampaikan rasa penghargaan dan terima kasih jang se-ikhlasnja atas.....

atas segala bantuan, kerdja sama dan partisipasi dari pihak Pimpinan Eksekutif, Muspida dan masjarakat seluruhnja, semoga Dewan Jth. ini beserta seluruh para Anggotanja akan selalu mendapat taufiq dan hidajahnja sorta inajah dari Allah S.W.T. untuk terus beramal-berkarija njata - melahirkan produk2 Legislatif, demi mengemban amanat penderitaan-rakjat.-

Banda Atjeh 26 M a i 1971.-

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Wakil Ketua,

d.t.o.

=,SOFJAN HAMZAH,=

PIDATO SAMBUTAN - GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH DALAM SIDANG ISTIMEWA DPRD.GR UN -
TUK MEMPERINGATI 12 TAHUN PROPINSI ATJEH SEBAGAI-
DAERAH ISTIMEWA.-
=====

ASSALAMU'ALAIKUM W.W.

Saudara Pimpinan, para Anggota Dewan dan hadirin jang terhormat,

A.

1. Pidato sambutan untuk memperingati 12 tahun Propinsi Atjeh - sebagai Daerah Istimewa, akan saja awali dengan sebuah ilustrasi tentang masaalah otonomi sebagai suatu perbandingan. Dalam tahun 1968 jang lalu, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta mengadakan suatu penelitian dalam bentuk research dan survey tentang masaalah otonomi Daerah dengan objek penelitian : Daerah Istimewa Jogjakarta. Tjara pendekatan jang dilakukan tentu sadjalah dititikberatkan pada approach ekonomi. Kegiatan penelitian oleh Fakultas Ekonomi tersebut pada achirnja melahirkan suatu kesimpulan jang bagi kita-agak mengedjutkan. Kesimpulan itu berbunji: "Otonomi jang seluas2nja bagi Daerah Istimewa Jogjakarta merupakan malapetaka ka !"
2. Saja sama sekali tidak berpretensi untuk membela atau membantah kesimpulan atau konklusi jang berasal dari suatu penelitian ilmiah itu. Jang mendjadi persoalan bagi kita adalah : kalau kita mengadakan pula penelitian di Daerah Istimewa Atjeh ini tentang masaalah jang sama, dengan methode dan approach - jang sama pula, kira2 kesimpulan apakah jang dapat kita tarik? Apakah Otonomi jang telah kita peroleh sedjak tahun 1956 - Meskipun kita rasakan belum tjukup luas - telah melahirkan kebahagiaan untuk rakjat didaerah ini, atau sebaliknya, merupakan malapetaka? Setjara lebih konkrit lagi pertanjaan itu akan berbunji : sampai kemanakah status "istimewa" Propinsi ini terhadap kehidupan dan penghidupan rakjat jang mendiami kawasan ini?
3. Status formil "istimewa" ini telah berumur 12 tahun, jang hari lahirnja kita peringati bersama sekarang ini. Barangkali - ada diantara Saudara2 jang menganggap bahwa pertanjaan2 seperti tertjantum diatas tidak lajak saja ungkapkan, lebih2 dalam forum Sidang Istimewa DPRD.GR. Anggapan serupa itu dapat saja dipahami, dan sekaligus saja hormai pula. Namun pertanjaan itu - perlu saja lontarkan, djika kita ingin membuat suatu analisa, - djika kita bermaksud membuat suatu balans.

Dengan kerdja-analisa menundjukkan bahwa kita berpikir dan tidak beku, dengan membuat balans kita akan mengetahui dimana titik2 kelemahan kita. Dengan itu semua, kita akan memperbaiki langkah, melengkapkan usaha dan menjempurnakan kegiatan sebagai pendukung tjitja2 otonomi jang se-luas2nja bagi Daerah.

4. Lahirnja Undang-Undang No. 24 tahun 1956 jang memberi status swatantra kepada Atjeh, kemudian disusul dengan muntjulnja Surat Keputusan Perdana Menteri R.I. No.1/Missi/1959 jang memungkinkan Atjeh memakai atribut "Daerah Istimewa". . tidak dapat kita lepas pisahkan dari sedjumlah latarbelakang. Diantara beberapa latarbelakang jang menonjol, dapatlah saja djabarkan sebagai berikut :

a) Faktor aspirasi dan tuntutan.

Aspirasi otonomi jang tumbuh dan berkembang sedjak tahun2 permulaan kemerdekaan harus tersalur setjara wadjar. Kemudian diiringi dengan tuntutan2, baik setjara lunak maupun setjara keras. Aspirasi dan tuntutan2 ini ahirnja melahirkan wadah Daerah Swatantra bagi Atjeh.

b) Faktor historis.

Sedjarah telah mentjatat betapa tingginja daja-lawan dan daja-tahan rakjat Atjeh dalam menentang pendjadjahan Belanda, djustru karena didjiwai oleh semangat Islam. Islam telah mendjiwai seluruh aspek dan segi kehidupan rakjat. Dalam mempertahankan Republik Proklamasi 17 Agustus 1945, sekali lagi Atjeh membuktikan diri sebagai daerah-perlawanan dan daerah-pertahanan jang paling tangguh, dan karenanja merupakan daerah-modal bagi Republik jang hendak dihantjurkan oleh Belanda. Djelas disini terdapat kehusususan.

c) Faktor pemulihan keamanan.

Dalam tahun 1949, Atjeh telah pernah mendapatkan status Propinsi dengan kekuatan "Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang". Status ini kemudian ditiadakan pada tahun 1950 setelah terbentuknja kembali Negara Kesatuan. "Peristiwa Atjeh" jang terdjadi pada tahun 1953 untuk sebahagian besar disebabkan oleh policy ini. Keamananan jang terganggu harus segera dipulihkan, dengan tjara menghilangkan "causa"-nja sendiri.

d) Faktor ecology dan socio-culturil.

Keadaan alam, letak geografis dan tjorak kemasjarakatan merupakan anasir-jang menumpang wadjarnja pemberian otonomi kepada daerah ini. Djika tidak demikian, kegontjangan2 dalam masjarakat akan selalu terdjadi. Keterbelakangan dibidang pembangunan dan pendidikan merupakan causa-utama untuk timbulnja apa jang disebut "social unrest".

5. Dengan memahami sebahagian dari latarbelakang2 itu, kitapun akan mendjadi paham pula tentang tudjuan dan sasaran jang diharapkan dari "Propinsi Daerah Istimewa" ini. Sebagai suatu wadah ia tidak seharusnya berada dalam keadaan vacuum dan statis. Ia harus diisi dan harus selalu aktif digerakkan melalui suatu proses serta mekanisme. Dalam hal ini saja mengkonstatir bahwa kita sering kali hanya tertegun pada wadah atau bentuk formalitas semata2, - se-olah2 kita telah mendjadi sedjenis "V.I.P." (Very Important - Provence) dengan merk "Daerah Istimewa" tadi. Tjara memandang seperti itu akan membuat kita mendjadi "exclusive", jang tidak sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan jang kita anut.
6. Jang lebih utama mendjadi tumpuan perhatian kita seharusnya adalah isi-otonomi, jang bagi daerah kita aspek2 keagamaan, peradatan dan pendidikan bersifat sangat dominant. Tjatatan tentang - latarbelakang2 jang telah diuraikan terdahulu kiranya telah mendjelaskan mengapa keistimewaan2 dalam bidang ini kita butuhkan. Namun dari kita semua diharapkan pula pengertian jang se-dalam2-nja bahwa sampai saat ini tjita2 otonomi jang seluas2nja bagi - Daerah2 belum sepenuhnya menedjadi realita, meskipun pokok2-gagasanja telah tertuang dalam TAP MPRS No.XXI tahun 1966.
7. Masaalah otonomi dan desentralisasi di Indonesia harus selalu kita tindjau dari dua sudut, jaitu :
 - a) adanja hasrat dari masjarakat-daerah untuk mengatur urusan2 - rumah tangga daerahnja sendiri,
 - b) adanja garansi objektif bahwa daerah berkemampuan untuk menjelemparkan hak2 otonomi jang dilimpahkan.Harus diakui bahwa antara kedua faktor tadi kadang2 terdapat ketidak-serasian. Dari masjarakat-daerah timbul hasrat jang besar untuk mengurus rumah-tangga-daerah, akan tetapi setjara objektif sebenarnya belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas2 - otonomi. Djika daerah otonom itu dilahirkan setjara paksa, di - chawatirkan djalanaja pemerintahan daerah akan ter-tegun2 jang - berarti malapetaka bagi rakjat daerah jang bersangkutan.
8. Dalam pada itu, daerah swatantra jang telah terbentuk menghendaki hak dan wewenang jang lebih luas daripada jang telah ada. Dari hak dan wewenang jang dikehendaki itu terdapat hak dan wewenang jang bersifat nasional jang tidak mungkin diserahkan oleh - Pemerintah Pusat. Djika hak dan wewenang tersebut diserahkan djuga, maka dichawatirkan prinsip Negara Kesatuan akan terganggu.

9. Dari uraian

9. Dari uraian diatas, dengan sendirinja kita mandjadi sadar bahwa - harus ada keseimbangan antara hasrat dan kemampuan dalam ber-otonomi. Selandjutnja hasrat ber-otonomi itu harus mengenal suatu - batas : hak dan wewenang jang menjangkut kepentingan Nasional tidak lajak mendjadi hak/wewenang daerah swatantra selama kita ingin mempertahankan sifat Negara Kesatuan sesuai dengan bunji dan djiwa Undang2 Dasar 1945. Dengan perkataan lain : otonomi jang se-luas2-nja tidaklah berarti harus sedemikian luasnja, sehingga daerah - swatantra mendjadi sematjam "Negara Bahagian" dalam sistim federalisme.

10. Berdasarkan pengalaman2 masa lalu, maka Pemerintah telah menarik - kesimpulan bahwa politik desentralisasi harus disertai/dilengkapi/dan dengan politik dekonsentrasi setjara seimbang. Politik dekonsentrasi merupakan komplement jang vital terhadap politik desentralisasi demi tertjiptanja tertib-pemerintahan di Indonesia. Sedangkan tertib-pemerintahan --sebagaimana telah kita ketahui-- merupakan prasarat untuk terdjelmanja stabilitas Nasional. Dan - stabilitas Nasional merupakan landasan untuk berhasilnja pembangunan.

Untuk mewujudkan gagasan2 seperti tersebut diatas, sedjak tahun - 1968 s/d tahun 1970 jang lalu, Pemerintah telah menjiapkan dan memajukan lima buah Rantjangan Undang-Undang kepada DPR-GR jang merupakan "satu paket". Kelima Rantjangan Undang2 itu masing2 mengatur :

- a) Tentang kedudukan dan Hubungan Pemerintah dengan Pemerintah di Daerah,
- b) Tentang Daerah Swatantra,
- c) Tentang Dekonsentrasi,
- d) Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
- e) Tentang Desa.

11. Paket Undang-Undang itu dimaksudkan sebagai pelaksanaan TAP MPRS - No. XXI tahun 1966, dan djuga untuk mengganti Undang-Undang No. 18 dan No. 19 tahun 1965 jang telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terachir. Semula diharapkan kelima Rantjangan Undang2 tersebut telah mendjadi Undang2 jang positif sebelum Pemilu, akan tetapi berhubung masih terdapat beberapa "crucial points" antara Pemerintah dengan sementara Freksi dalam DPR-GR, maksud tersebut sampai saat ini belum mendjadi kenjataan.

12. Untuk mendjadi..... -

12. Untuk mendjadi pengetahuan kita bersama, ada baiknja dalam kesempatan ini saja sebutkan beberapa "crucial points" jang saja maksudkan tadi, diantaranya ialah :

a) Mengenai Kepala Daerah.

Pemerintah menghendaki agar Kepala Daerah (Tingkat I dan II) ditundjuk/diangkat oleh Pemerintah, sedangkan beberapa Fraksi Politik menginginkan tjara pemilihan.

b) Mengenai Sekretaris Daerah : idem dito,

c) Mengenai lembaga B.P.H.

Pemerintah bermaksud menghapuskan lembaga B.P.H. jang tidak effisien itu, beberapa Fraksi Politik menghendaki B.P.H. tetap dipertahankan.

d) Mengenai Daerah Administratif.

Pemerintah bermaksud menghidupkan kembali Keresidenan dan Kewedanaan (dalam bentuk baru), beberapa Fraksi Politik menghendaki sebaliknya.

e) Mengenai Perimbangan Keuangan.

Belum tertjapai suatu kebulatan pendapat tentang berapa persentase jang wadjar hak daerah dari penghasilan Negara dalam bentuk rupiah.

f) Mengenai aparat Dekonsentrasi.

Pemerintah bermaksud memberi peranan jang lebih besar bagi Pamongpradja (sebagai aparat jang mewujudkan tertib-pemerintahan didaerah), beberapa Fraksi Politik tidak menyetujui maksud itu.

Kita wadjar mengharapkan agar DPR hasil Pemilu nanti akan dapat mengatasi "crucial points" tadi, sehingga garis2 kebidjaksanaan baru dibidang otonomi dan desentralisasi akan segera dapat diletakkan.

13. Sengadja saja menguraikan beberapa segi dari masaalah otonomi/desentralisasi setjara agak meluas, dengan maksud agar kita dapat menilai diri kita sendiri dan kemudian dapat melihat prospek2 pada masa2 mendatang dengan se-tepat2nja.

Propinsi Daerah Istimewa Atjeh sampai saat ini telah memperoleh hak/wewenang otonomi jang menjangkut urusan2:

- 1) Pemerintahan Umum,
- 2) Pekerdjaan Umum,
- 3) Kesehatan,
- 4) Pertanian,
- 5) Kehutanan,
- 6) Poternakan,

7)

- 7) Perindustrian,
- 8) Pendidikan Dasar,
- 9) Perikanan Laut,
- 10) Perikanan Darat,
- 11) Sosial,
- 12) Perumahan,
- 13) Perkebunan Rakyat,

disamping hak/wewenang dibidang Keuangan Daerah, Kepegawaian Daerah dan per-undangan Daerah.

Kita tentunya telah berusaha agar hak/wewenang yang telah kita terima itu dapat kita selenggarakan dengan se-baik2nja, bahkan semestinja harus lebih baik daripada sebelum hak/wewenang itu menjadi urusan daerah. Dalam pada itu, kitapun dengan jujur harus mengakui kekurangan dan kelemahan2 kita dalam pelaksanaan tugas2-otonomi ini, sehingga beberapa bidang masih belum begitu lanjut-penjelenggaraannya dan hasilnya pun belum memadai sebagaimana yang kita harapkan.

14. Ada sejumlah faktor-penjebab mengapa beberapa wewenang otonomi - belum dapat kita selenggarakan setjara memuaskan. Faktor2 itu ada yang bersifat internal, ada pula yang bertjorak eksternal. antara lain :

a) Kekurangan pengalaman.

Propinsi Daerah Istimewa Atjeh termasuk daerah swatantra yang umurnya relatif masih singkat. Berbeda dengan Propinsi2 di Jawa, maka kita dalam djaman pendjadjahan Belanda belum pernah memperoleh kesempatan untuk mengurus rumah-tangga kita sendiri. Semua wewenang yang dilimpahkan oleh Pusat, bagi kita merupakan persoalan2 baru.

b) Kelemahan aparatur.

Untuk berhasilnya penyelenggaraan urusan2 otonomi, kita memerlukan personil yang trampil dan berkeahlian dibidangnya. Bertahun2 kita mengalami kelebihan personil dalam segi kuantitas, sebaliknya dibidang kualitas kita terus-menerus mengalami kekurangan. Kekurangan ini menjadi tambah parah karena recruitment yang tidak berentjana, penempatan yang tidak tepat, disertai pula dengan pertimbangan2 politis dalam pengangkatan pegawai2 baru.

c) Kekurangan dana/biaya.

Kekurangan dana/biaya telah merupakan penyakit kronis bagi semua daerah

semua daerah swatantra, termasuk Propinsi Atjeh. Antara dana yang dapat disediakan dengan jumlah kebutuhan riil masih terpisah - djauh. Daerah2 mengharapkan perimbangan keuangan yang lebih lajak dari Pusat, disamping harus menggali sumber2 keuangan daerah sendiri dengan sekuat tenaga, baik setjara intensifikasi maupun setjara ekstensifikasi. Kekurangan dana ini makin bertambah terasa, karena kebutuhan2 pembangunan yang mendesak.

d) Kelemahan organisasi dan management.

Pelaksanaan tugas2 keswatantraan baru akan mentjapai hasil yang maksimal djika organisasi Pemerintah Daerah tersusun dengan rapi, memiliki struktur yang pasti disertai dengan management yang berproses dengan baik. Dalam bidang ini kelemahan kita masih agk menjolok, sehingga kesimpang-siuran dan overlapping dalam prosedur-kerdja masih sering2 terdjadi. Kita menjusun struktur organisasi berdasarkan jumlah pegawai, bukan berdasarkan jenis dan jumlah-pekerdjaan, sehingga management mendjadi "ngawur".

e) Kelemahan dibidang pembinaan.

Pemerintah Pusat bertanggung djawab terhadap pembinaan daerah2 swatantra. Selama ini terutama dizaman Orla tugas pembinaan ini kurang mendapat perhatian, walaupun ada hanja bersifat insidentil dan tidak terarah. Kita sendiripun kurang menaruh perhatian terhadap pembinaan Kabupaten dan Kotamadya, padahal Kabupaten dan Kotamadya merupakan pelaksana2 wewenang otonomi yang paling dekat dengan masyarakat.

Djika kita telah menjadari kelemahan2 kita dalam penjelenggaraan urusan2 otonomi Daerah, kitapun akan segera mendjadi insaf bahwa antara tjita2 dan realita masih terdapat djurang pemisah yang dalam. Begitu pulalah antara bentuk "Daerah Istimewa" dengan kenyataan "isi otonomi" yang telah dilimpahkan.

Apabila kita mengadakan studi komparatif terhadap seluruh Propinsi di Indonesia, akan kita dapati hanja ada tiga Propinsi yang bersifat atau khusus, jaitu D.C.I. Djakarta Raya, Propinsi Irian Barat serta Daerah-Istimewa Jogjakarta yang keistimewaannya hanja terletak dalam masalah Kepala Daerah. Propinsi Atjeh yang kita tjintai ini dalam persoalan isi otonomi tidaklah sangat berbeda dengan Propinsi2 "biasa" lainnya.

6. Kalau tjara menindjau masalah ini kita lakukan setjara sepihak, tentu - sadja kita akan ketjewa oleh kenyataan ini. Akan tetapi djika persoalan ini dapat kita pandang lewat horizon yang lebih luas, keketjewaan itu - sedikit banjarknja akan dapat kita atasi. Keistimewaan daerah ini djanganlah selalu dan terlalu kita gantungkan kepada Pemerintah Pusat, -

akan tetapi -

akan tetapi harus lebih banjak kita dasarkan kepada inisiatif kita sendiri, berdasarkan usaha dan iktiar kita sendiri sebagai bagian dari "Negara Kesatuan".

17. Dalam bidang pelaksanaan unsur2 Sjariat Islam misalnja, kita djangan terlalu menggantungkan diri kepada adanja peraturan2 atau penganesahan2 Pemerintah. Kesadaran ber-sjariat jang mendalam dan meluas dikalangan masjarakat, harus selalu kita djadikan titik tolak agar "amar ma'ruf, nahi mungkar" benar2 mendjadi kenjataan di-tengah2 masjarakat, dengan dorongan dan bantuan Pemerintah setjara kontinu.

Tumbuh dan mekarnja "Masjarakat Islam" tidak ditentukan dari atas, akan tetapi harus dibina dan dipupuk dari bawah. Ini merupakan tantangan bagi kita, dan djawaban atas tantangan ini akan menentukan kelak apakah-tjorak "istimewa" kita ini dapat kita pertahankan atau akan lenjap. Nama "Daerah Istimewa" setiap waktu dapat dihapus dan dihilangkan, akan tetapi marilah kita berusaha dan ber-iktiar-supaja tjorak chas "Masjarakat Islam" didaerah ini dapat terus berlandjut.

18. Dalam kesempatan ini kiranja kita perlu merenungkan kembali makna-dari kalimat "Pantjasila tidak bertentangan dengan Islam", baik dalam kwalitasnja sebagai Aqidah maupun dalam kedudukannja sebagai Sjari'at. Dengan demikian, pelaksanaan dan pengalaman terhadap Pantjasila akan berarti pula pelaksanaan sebahagian unsur2 Sjari'at Islam. Saja tidak mengatakan bahwa Pantjasila sama-sebangun dan identik dengan Islam. Jang hendak saja garis-bawahi djustru adalah: Pantjasila tjukup luas dan tjukup lywes terhadap pelaksanaan unsur2 Sjariat Islam bagi pemeluk2nja, asal sadja kita tjukup arif mempergunakan kesempatan jang lapang ini.

Untuk maksud itu kita memerlukan suatu approach baru, suatu tjara-pendekatan jang mengandung unsur2 "applied". Keistimewaan Atjeh di bidang keagamaan merupakan kenjataan jang tidak dapat dibantah, kenjataan itu mendjadi sah bukan karena pengakuan Pemerintah lewat peraturan atau legitimasi, akan tetapi djustru karena djiwa masjarakat Atjeh sendiri membuktikan realita itu.

Pemerintah mendukung suatu fungsi untuk mewujudkan kesedjahteraan-untuk seluruh rakjat, termasuk kesedjahteraan jang bersifat spirituil-keagamaan. Pelaksanaan unsur2 Sjariat Islam bagi masjarakat Atjeh, merupakan pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan spirituil masjarakat. Akan tetapi, prakarsa pertama dan utama dalam hal ini harus terletak dalam tangan masjarakat sendiri, kemudian Pemerintah memberi dorongan dan bantuan sebagaimana selama ini telah ber-kali2 terbukti.

20. Sjari'at Islam disamping menjentuh masaalah2 ubudijah, tidak kurang pula mengatur segi2 jang bersifat mu'amalah. Saja berpendapat bahwa dalam segi mu'amalah ini kita masih sangat banjak mengalami kelemahan. Kelemahan kita dalam bidang ini, hendaknya dapat segera kita atasi, dengan tjara memanfaatkan program2 pembangunan Pemerintah Orde Baru dewasa ini dengan se-tepat2nja dan dengan se-baik2nja. Djika kita dapat memahami bahwa usaha pembangunan merupakan bahagian dari Sjari'at Islam, dan kalau kita sadar bahwa berpartisipasi dalam pembangunan merupakan "fardhu kifajah", Insja Allah kita akan selalu mendapat petunjuk menudju kepada keridhaan Alahi, sehingga kita akan mendjadi Mukmin jang "se-imbang", sesuai dengan do'a jang selalu kita ulang2 :

وَقَدْ أَنبَأَ فِي الدُّنْيَا كُنُوسًا وَمِنْهَا الْبُخْرَى
كُنُوسًا وَقَدْ عَدَّ بِالنَّارِ

Dengan tjara pendekatan itu, kita mendjadi yakin bahwa status istimewa bagi daerah kita benar2 akan mendjadi rahmat-kurnia, bukan azab-malapetaka. Selandjutnja kitapun akan mampu melihat prospek2 jang tjerah untuk masa2 mendatang.

3. Saudara2 Ketua dan para Anggota Dewan jang terhormat.

1. Hari ini djuga adalah pembukaan masa sidang ke-I tahun 1971/1972 DPRD, GR Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dengan atjara Pembahasan-Rentjana Anggaran Pendapatan-Belandja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tahun 1971/1972.

Sebagaimana telah sama2 kita ketahui untuk tahun Anggaran 1969/-1970 Pemerintah Daerah telah menjisihkan sedjumlah Rp.530 djuta-rupiah untuk biaya Pelita Daerah jang meliputi 153 projek. Djumlah jang dapat direalisir sebanjak 146 projek dengan djumlah pembi-ajaan Rp. 458.438,516,95.

2. Dalam tahun 1970/1971 untuk anggaran Pelita Daerah Rp.600.- djuta jang meliputi 148 buah projek dan telah dapat direalisir sedjumlah 138 buah dengan pembiayaan Rp.485,160,306,70. Untuk tahun 1971/1972 bagi pelaksanaan Pelita Daerah direntjanakan sedjumlah Rp.715 djuta jang mana hal ini dirasakan perlu mendapat pembaka-san dari Dewan Jth.

3. Bahwa untuk mendjamin berhasilja pelaksanaan jang effectif anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah tahun 1971/1972 perlu ada nja penjelenggaraan keuangan Daerah jang baik, tertib dan teratur pada Dinas2 dan Lembaga Daerah dalam lingkungan Pemerintahan Daerah.

Kata Sambutan Pangdam- I Selaku
Ketua Muspida Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
Pada Ulah ke- XII Prop, Dista Dlm Sidang DPRD-GR.

Assalamualaikum w.w.

Jth, Sdr, Gubernur/Kepala Daerah.

Wakil Ketua/Dewan Anggota Muspida Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Jth, Sdr, Pimpinan/Para Anggota DPRD-GR Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Jth, Para hadirin sekalian.

Segala puji bagi Tuhan Pentjipta Alam-Tuhan Jang Maha Esa jang telah memberikan Rahmat dan Inajah-Nja kepada kita sekalian, sehingga saat ini kita dapat bertemu pada pembukaan Sidang Pleno ke-I tahun 1971/1972 dalam rangka memperingati lahirnja Daerah Istimewa Atjeh jang ke-XII.

Sementara itu, kami merasa gembira dan berterima kasih atas kesempatan jang diberikan, untuk memberikan kata sambutan pada kesempatan ini.

Hadirin jang kami hormati.

Didalam memperingati Ulang Tahun Propinsi Daerah Istimewa Atjeh jang ke-XII ini, tentuja bukan sekedar memperingati kelahiran wadahnja an-sich. Karena wadah itu hanya sekedar alat. Alat ini sejogjanja kita gunakan untuk mentjapai tudjuan.

Sebagai alat, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh jang setjara sehat telah mendapat legalitas formil, perlu adanja pengembangan potensi jang ada, dibina, dibangun dan dimanfaatkan untuk masjarakat.

Dalam hal ini peranan manusia sebagai pelaksana amat menentukan. Maka mendjadi kewadajiban badan2 executief ber-sama-samadangan legislatief mendaja gunakan potensi manusia ini untuk mentjapai tudjuan2 tadi. Pondaaja gunaan dapat berwujud kearah pembangunan materil maupun sprituil, sesuai dengan tudjuan Nasional jang hondak kita tjapai, masjarakat adil dan makmur.

Sjukur Alhamdulillah, pondaaja gunaan potensi manusia, selama tumbuhnja Orde Baru ini dapat dimanfaatkan, bahkan potensi materil pun sudah dapat dimanfaatkan, terutama dalam rangka Pembangunan Lima Tahun tahap pertama (jang sekarang sudah tahun ke-tiga)

Malau kita melihat setjara objektif hasil2 jang telah ditjapai dalam masa kurang lebih dua tahun ini, kita dapat berbangga, sekalipun masih banjak ke-lemahan-kelemahannja.

Nilai rupiah mendjadi mantep, harga stabil, target pendapatan Negara dapat terpeuhi dan sebagainya.

Oleh karena itu mendjadi kewadajiban bagi kita untuk tetap berpendirian, bahwa tugas2 Nasional jang " program oriented atau djuga achievement oriented " itu perlu tetap kita teruskan.

Penerusan tugas2 Nasional itu, tidak akan mampu dilaksanakan oleh satu pihak sadja tetapi partisipasi seluruh potensi jang ada perlu diikuti sertakan.

Untuk tidak terdjadi " chaos " dalam partisipasi ini, perlu adanja suatu tjara jang sehat, sesuatu sarana jang demokratis - itulah Pemilihan Umum jang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Djuli 1971 nanti.

Pemilihan Umum tidak sadja menjangkut tjara, tetapi harus memperkuat landesannja, jaitu Pantjasila dan Undang2 Dasar 1945.

Berarti, Pemilihan Umum nanti harus mampu menompatkan atau memilih wakil2 jang akan duduk di Lembaga2 Legislatif setjara tepat. Wakil2 itu antara lain harus berbudi luhur, ahli dan bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa.

Untuk ini izinkanlah kami mengulangi apa jang dikemukakan oleh Asisten Pribadi Presiden Majdjen Ali Murtopo, bahwa untuk tetap mempertahankan keutuhan ketahanan Nasional dan

dan untuk tetap tegaknya Pantjasila dan Undang2 Dasar 1945 kita to- lah banjak memberikan pengorbanan. Tetapi selama 20 tahun lebih - persoalan Negara ternjata hanya digunakan untuk petualangan2 po- litik bukan untuk kepentingan Nasional.

Menurut homat kami, apa jang dikemukakan oleh Majdjen Ali Mur- topo mengingatkan kepada kita sekalian, bahwa kita djangan lagi - terdjerumus kedalam kantjah petualangan politik, seperti masa lam- pau jang telah kita lalui itu.

Hadirin jang saja hormati.

Untuk tidak terulang lagi keadaan sematjam itu, sejojana - lah kita berusaha dan bekerdja keras terutama untuk masa2 menda - tang.

Kita djangan lagi terlona di-nina bobokkan oleh hal2 jang ti- dak prinsipil, seperti soal gelar, namadan sebagainya. Ini hanjalah merupakan kulit/bukan isi.

Daerah Istimewa bagi Atjeh, adalah gelar formil jang diberikan. Gelar ini tidak ada artinja sama sekali kalau hanya di-bangga2kan - sadja.

Jang penting mengisinja. Isi jang terbaik adalah karya2njata jang dihadjati oleh masyarakat, jaitu Pembangunan, baik rohaniah - maupun lahiriah.

Begitu pula unsur2 sjariat Islam, djangan sekedar mendjadi kebanggaan. Dalam hubungan ini menurut hemat kami, djika kita sudah mendjadi Muslim jang baik dengan sendirinja unsur2 Sjariat Islam - itu adalah kewadajiban jang seharusnya dipenuhi.

Dengan demikian, tidak diperlukan lagi legalitas manusia ma- napun. Karena Unsur2 Sjariat Islam itu merupakan perintah dari Tu- han, sebagai mana jang tertjantum dalam kitab sutji Al-Qur'an.

Kita tidak akan mendapati satu ajatpun didalam Al-Qur'an - jang mewadjabkan adanja pengesahan dari manusia tentang apa jang - telah dite ntukan oleh Tuhan.

Jang ada ialah kewadajiban melaksanakan suruhan dan mondja- uhi larangan-Nja.

Apabila hal ini dilaksanakan, sebenarnya ia adalah Muslim - jang baik. Bahkan tidak akan ada umat Islam jang ter-kotak2 dalam kelompok dan golongan.

Dengan pola2pikiran tersebut kami merasa berkewadajiban pada kesempatan ini, mengadjak umat Islam di daerah ini khususnya, untuk ber-uchuah Islamiah dengan niat dan iktikat jang ichlas.

Kami yakin, Baladatul Thaibatun Wa-rabbun Ghafur, sebagai sa- saran pokok dari perdjjuangan kita akan lebih dekat djalan pentja - palannja. Insja Allah.

Hadirin jang kami hormati.

Pada kesempatan ini, kami ingin pula mengemukakan bahwa ka- mi sebagai alat Pertahanan Koamanan dalam hubungannya dengan tu- gas-tugas Pemerintah Dewasa ini, tidak lain adalah mem -back-up - setiap pelaksanaan program Pemerintah dan menegakkan kewibawaan - Pemerintah.

Seperti diketahui Gubernur/Kepala Daerah merupakan pengu- sa Tunggal di Daerah jang bertanggung djawab dalam bidang kesedjah- teraan.

Alat Pertahanan Keamanan (HANKAM) bertanggung djawab d a- lam bidang Pertahanan dan Keamanan. Karena itu keamanan dan kese- djahteraan tidak bisa berdjari setjara terpisah. Satu sama lain sa- ling menutup. Dengan kata lain keamanan dan Kecedjahteraan merupa- kan Dwi tunggal.

Kiranya Peringatan Ulang Tahun Propinsi Daerah Istimewa @ Atjeh jang ke-XII ini, dapat didjadikandorongan setjara aktif-posi- tif memperkokoh commitment terhadap perdjjuangan dalam rangka men- tjapai tudjuan Nasional kita. Selamat berulang tahun, semoga kita senantiasa diberi "aufiq dan Hidajah oleh Tuhan Jang Maha Esa, Sokian, terima kasih. Wabillahi "aufiq Walhidajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kutaradja 26 Mei 1971.-

Panglima

dto

A. K U N A E F I

Brigadir Djenderal T.N.I.